



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

• PERUBAHAN • RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan Jend. A Yani 16 Mojokerto



KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pelaksanaan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan, baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026, sedangkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama empat bulan kedepan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO



YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19560613 199803 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN BERKENAAN	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	22
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	38
BAB IV PENUTUP	68
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	68
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	69
4.3. Rencana Tindak Lanjut	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Penyusunan Perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah baru yang merupakan penggabungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintahan Desa yang sebelumnya merupakan Tupoksi Bagian Pemerintahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Jadi Rencana Kerja DPMD disusun dengan berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat perubahan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA PD) yang merupakan penjabaran teknis dan anggaran Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA PD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan Perubahan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RPAPBD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang sosial budaya, kelembagaan, ekonomi maupun teknologi terapan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal. Selain itu, Perubahan Renja DPMD ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada PRKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dan Program Strategis Nasional Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;

27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latarbelakang penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah serta Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen PRKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD

1.2. Landasan Penyusunan

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN BERKENAAN

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang menjelaskan :

- Catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
- Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan triwulan I Tahun 2025, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam, 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja triwulan I Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan realisasi Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1. (T-C.29) dibawah ini :

Tabel 2.1. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Th. Berjalan (2025)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Keg. s/d Th. berjalan (TW 1 Th. 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1	3			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	1	3	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	85,3 (A)	85,26 (A)	85,3 (A)	101%	85,5 (A)	-	-
						Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Jenis inovasi	3 Jenis inovasi	3 Jenis inovasi	3 Jenis inovasi	100 %	3 Jenis inovasi	3 Jenis inovasi	100 %
2	1	3	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,94%	94,2%	94,94%	94,2%	98%	94,3%	-	-
2	1	3	0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	100%	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	100%

2	1 3	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86,04%	84,7%	86,04%	84,62%	97%	84,7%	-	-
2	1 3	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	45%	50%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	100%	24 paket	12 paket	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	76 Laporan	72 Laporan	76 Laporan	105,56 %	72 Laporan	24 Laporan	30 %
2	1 3	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

2	1 3	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	-	-
2	1 3	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
2	1 3	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	1 3	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	94%	90%	94%	104,4%	90%	22 %	25 %
2	1 3	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	3 Unit	25%
2	1 3	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	5 Unit	25 %
2	1 3	0 2			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	20%	20%	20%	100%	20%	-	-
2	1 3	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan desa	Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	-	-

2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	-	-
2	1 3	0 2			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	18,2%	10%	18,2%	182%	10%	5 %	50 %
2	1 3	0 2	2.0 1	0 2	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	100%	220 Desa	44 Desa	25%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 3	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	99,41%	91%	99,41%	109,2%	91%	23 %	25%
2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	34 %
2	1 3	0 4	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	340 Dokumen	339 Dokumen	340 Dokumen	339 Dokumen	99,71%	340 Dokumen	-	-

2	1 3	0 4	2.0 1	0 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	100%	299 Dokumen	299 Dokumen	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	0 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	50 Dokumen	12 Dokumen	25 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	100%	304 Dokumen	113 Dokumen	37 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	100%	36 Dokumen	6 Dokumen	16,7 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	100%	304 Dokumen	10 Dokumen	3,3 %
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	86%	88%	86%	88%	102,32 %	89%	87%	96 %

					Adat										
2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100%	18 Kegiatan	18 Kegiatan	34 %	
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	34 %	
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	100%	479 Lembaga	100 Lembaga	23 %	

					Hukum Adat									
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	112,50 %	8 Dokumen	2 Dokumen	25 %
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	74%	78,99%	74%	78,99%	106,74 %	78%	77 %	98 %
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	2 Kegiatan	34 %

2	1 3	0 5	2.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	34%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	34%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2016 - 2025, hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.2. (T-C.30) berikut dibawah ini :

Tabel 2.2. (T-C. 30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2026	2026	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	0,7453	0,7663	0,7690	0,8492	0,8275	0,8325	IKD terlampaui
2	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKK terpenuhi
3	Jumlah Desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	80	60	40	20	10	0	102	63	0	0	0	0	IKK terpenuhi
4	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	40	50	58	66	72	78	45	69	219	299	299	299	IKK dan IKU terlampaui
5	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif		IKK	-	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	70,03 %	74,48 %	78 %	78 %	79 %	80 %	IKU terlampaui
6	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif		IKK	-	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	86 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %	IKU terlampaui

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerinrah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain :

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;

4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya koordinasi;
- 2) Terbatasnya anggaran;
- 3) Terbatasnya SDM PNS, tidak sesuai dengan analisis jabatan;
- 4) Terbatasnya Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

Faktor Tantangan Organisasi :

- a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.
- b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.
- c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).
- e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
2. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3. Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran besar yang diterima oleh desa dengan adanya ADD dan Dana Desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
5. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan.
6. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
7. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan pembinaan lebih lanjut.
8. Masih kurangnya peningkatan pengembangan usaha ekonomi.
9. Masih kurangnya peningkatan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM di tingkat desa

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3. (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 (A)	5,451,433,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 (A)	6,259,066,200	
		Kab. Mojokerto	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi			Kab. Mojokerto	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94.3%	4,978,223,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94.3%	4,978,223,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ 14 bulan	4,978,223,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ 14 bulan	4,978,223,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	194,210,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	276,843,200	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57,610,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	185,110,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	14,547,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19,800,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	17,850,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,200,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	33,600,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	26,187,200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	29,949,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90%	725,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	725,000,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	168,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	168,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	111,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	111,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	95,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	95,000,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	16,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	16,000,000	
II	Program Penataan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang tertata dengan baik	23%	175,000,000	Program Penataan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang tertata dengan baik	23%	169,650,000	
	Penyelenggaraan Penataan desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	70 Desa	175,000,000	Penyelenggaraan Penataan desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	70 Desa	169,650,000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	175,000,000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	169,650,000	Mendukung SDG,s Program Penanggulangan Kemiskinan

III	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	72%	86,000,000	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	72%	78,142,700	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	86,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	78,142,700	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	43,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	38,392,700	Mendukung SDG,s Program Penanggulangan Kemiskinan
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	43,000,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	39,750,000	Mendukung SDG,s
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	92%	9,571,620,578	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	92%	9,107,638,678	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				9,571,620,578	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				9,107,638,678	
		Kab. Mojokerto	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	18 Kegiatan			Kab. Mojokerto	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	18 Kegiatan		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	25,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	22,750,000	Mendukung SDG,s Program Penanggulangan Kemiskinan

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	49,700,000	Mendukung SDG,s Program Penanggulanga n Kemiskinan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	111,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	100,118,000	Mendukung SDG,s Program Penanggulanga n Kemiskinan
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	250,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	322 Orang	250,000,000	Mendukung SDG,s
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	20,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	18,653,500	Mendukung SDG,s
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	25,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	55,100,000	Mendukung SDG,s
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	75 Dokumen	250,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	75 Dokumen	28,237,500	Mendukung SDG,s Program Penanggulanga n Kemiskinan
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	250,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	0	Mendukung SDG,s
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	100,000,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	98,175,000	Mendukung SDG,s

	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	24 Dokumen	8,235,620,578	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	24 Dokumen	8,218,848,078	Mendukung SDG,s
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	189,356,600	Mendukung SDG,s
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	110 BUMDesa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	110 BUMDesa		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	55,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	76,700,000	
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				1,523,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				1,745,425,000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	89%	1,523,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	89%	1,745,425,000	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat	18 Kegiatan	1,425,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat	19 Kegiatan	1,627,825,000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	325,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	420,200,000	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	325,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	704 Lembaga	317,400,000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	75,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	63,525,000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	700,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	826,700,000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	78%		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	78%		

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif	6 Kegiatan	98,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif	6 Kegiatan	117,600,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	68,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	89,000,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	30,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	28,600,000	
JUMLAH					16,807,053,578					17,359,922,578	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta Program Pengembangan Nilai Budaya dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Kabupaten Mojokerto. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto serta Pokir Dewan untuk tahun 2025 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana table 2.4. berikut :

Tabel 2.4. (T-C. 32)

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Pengurus BUMDesa yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
2	Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Jatijejer, Kab. Mojokerto, Trawas, Jatijejer	Terbatasnya Pendanaan unit BUMDes yang terkendala anggaran	-	Usulan belum bisa diakomodir
3	Pembinaan RT/RW	Dusun Gedeg Wetan, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Jumlah RT/RW yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
4	Pembinaan RT/RW	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah RT/RW yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
5	Pembinaan LPM	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah LPM yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
6	Peningkatan Kapasitas Kader PKK desa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Kader PKK Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah

7	Peningkatan Kapasitas Kader PKK desa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Kader PKK Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
8	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
9	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Desa Jatilangkung, Kab. Mojokerto, Pungging, Jatilangkung	Pelatihan ketrampilan menjahit dan bordir bagi PKK Desa dan pelatihan pembuatan roti dan kue bagi kader PKK dan pengadaan alat	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
10	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Desa Kenanten, Kab. Mojokerto, Puri, Gayaman	Jumlah Kader PKK Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
11	Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa bersama TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Desa Sukosari, Kab. Mojokerto, Trawas, Sukosari	Belum tersedianya prasarana wisata desa sebagai tempat hiburan, penyaluran bakat dan tempat untuk berkumpul warga masyarakat yang representative dan memadai	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
12	Pembinaan administrasi pemerintahan desa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah

13	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
14	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Dusun Beratwetan RT.05 RW.04 Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
15	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Dusun Beratwetan RT.05 RW.04 Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
16	Pembinaan administrasi pemerintahan desa	Dusun Beratwetan RT.05 RW.04 Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
17	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Terusan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Terusan yang akan dikelola oleh BUMDesa Terusan	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
18	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa BeratWetan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)

			wifi di desa BeratWetan yang akan dikelola oleh BUMDesa BeratWetan		
19	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Gembongan , Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Gembongan yang akan dikelola oleh BUMDesa Gembongan	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
20	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa NgaresKidul, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa NgaresKidul yang akan dikelola oleh BUMDesa NgaresKidul	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
21	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Bandung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Bandung yang akan dikelola oleh BUMDesa Bandung	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
22	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Gedeg, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)

			wifi di desa Gedeg yang akan dikelolah oleh BUMDesa Gedeg		
23	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Sidorejo yang akan dikelolah oleh BUMDesa Sidorejo	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
24	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten , Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Jolotundo yang akan dikelolah oleh BUMDesa Jolotundo	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
25	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Ngabar, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Ngabar yang akan dikelolah oleh BUMDesa Ngabar	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
26	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Gedeg, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)

			wifi di desa Kupang yang akan dikelola oleh BUMDesa Kupang		
27	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	DESA JUMENENG KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO , Kab. Mojokerto	Jumlah penyertaan modal usaha badan usaha milik desa "mekar sejahtera"	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
28	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	KECAMATAN TRAWAS , Kab. Mojokerto	Jumlah bantuan pelatihan aneka olahan berbahan dasar tape ibu pkk se-kabupaten trawas	nilai usulan 100.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
29	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	KECAMATAN GONDANG, Kab. Mojokerto	Jumlah bantuan pelatihan aneka olahan singkong ibu pkk se-kecamatan gondang	nilai usulan 100.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
30	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	KECAMATAN JATIREJO , Kab. Mojokerto	Jumlah bantuan pelatihan kerajinan tas dari kain goni kombinasi sulam pita ibu pkk se-kecamatan jatirejo	nilai usulan 100.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
31	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	KECAMATAN PACET, Kab. Mojokerto	Jumlah permohonan bantuan pelatihan tas tulis anyaman plasti ibu pkk se-kecamatan pacet	nilai usulan 100.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan

misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Misi 3 : **"Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera."** maka ditetapkan tujuan DPMD Kabupaten Mojokerto yang mengacu pada sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

" Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa "

Dengan indikator tujuan : **" Indeks Desa "**

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa	81.63 %
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.29 %
		Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	10.94 %
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20.00 %
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Tahun 2025. Perubahan Renja DPMD merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran DPMD (RKA PAPBD DPMD) Tahun 2025.

Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 memuat **5 program, 10 kegiatan dan 31 sub kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 17,359,922,578-** berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 (P-RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2025). Untuk itu seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang menjadi ruang lingkup DPMD dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Berdasarkan prioritas pembangunan yang didasarkan pada pencapaian pembangunan sampai dengan 2026 dan prediksi pelaksanaan pembangunan satu tahun kedepan, maka Perubahan Renja DPMD pada tahun 2025 ini akan diarahkan untuk kegiatan yang menunjang :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, kerjasama dengan Badan/Dinas lain di seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mencapai tertib pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas lain di bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan pengelola di DPMD bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;

4. Peningkatan pelaksanaan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan serta penyampaian laporan seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kepala Daerah.

Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penataan desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Desa yang Tertata

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya efektivitas kerja sama desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

- a) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa
- b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

- 1) Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan
- 2) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan

SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa.
- 2) Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Adapun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari PAPBD Kabupaten diuraikan sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
MATRIK RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	U P	B/ L	INDIKATOR PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	TARGE T RENJA 2025	TARGET RENJA P 2025	LOKASI	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (Rp.)	PAGU ANGGARAN HASIL EFISIEN APBD 2025 (Rp)	PAGU ANGGARAN USULAN RENJA-P 2025 (Rp)	SUMBE R DANA	TAMBAH / KURANG	KETERANG AN
1	2	3	4	5	7	8		9	10		11	12	13	14
I	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 (A)	85,50 (A)		5,399,533,00 0	5,369,066,200	6,259,066,200		859,533,200	
					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi	3 jenis inovasi							
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		L	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	94,3 %		4,978,223,00 0	4,978,223,000	4,978,223,000		0	
	2.13.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ 14 bulan	32 Orang/ 14 bulan	Kabupat en Mojokert o	4,978,223,00 0	4,978,223,000	4,978,223,000		-	
		Rincian :												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							2,696,714,00 0	2,696,714,000	2,696,714,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	

		Tambahan Penghasilan ASN							2,181,009,000	2,181,009,000	2,181,009,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN							100,500,000	100,500,000	100,500,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%		142,310,000	111,843,200	276,843,200		134,533,200	
	2.13.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	Kabupaten Mojokerto	20,110,000	20,110,000	185,110,000		165,000,000	Tingginya frekuensi rapat di DPMD. Kursi rapat terbatas dan banyak yang sudah rusak. AC dan Laptop banyak yang rusak parah (Untuk Sekretariat PKK)
		Rincian :												
		Pengadaan Sound sistem, mic							20,110,000	20,110,000	20,110,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
		Pengadaan kursi rapat, AC, Laptop, printer, kamera							-	-	165,000,000			
	2.13.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	Kabupaten Mojokerto	15,600,000	14,547,000	14,547,000		(1,053,000)	
		Rincian :												

		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat							15,600,000	14,547,000	14,547,000	-	-	
2.13.01.2.06.005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kabupaten Mojokerto	19,800,000	17,850,000	17,850,000		(1,950,000)	
		Rincian :												
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cetak disposisi, amplop dinas, map dinas, cetak kertas NCR SPPD, Banner, foto copy)							19,800,000	17,850,000	17,850,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
2.13.01.2.06.006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	3,200,000	3,200,000	3,200,000		-	
		Rincian :												
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							3,200,000	3,200,000	3,200,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
2.13.01.2.06.007		Penyediaan Bahan/Material		L	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kabupaten Mojokerto	33,600,000	26,187,200	26,187,200		(7,412,800)	
		Rincian :												

			Penyediaan Alat Tulis Kantor							33,600,000	26,187,200	26,187,200	-	-	
	2.13.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	52 Laporan	Kabupaten Mojokerto	50,000,000	29,949,000	29,949,000		(20,051,000)	
			Rincian :												
		Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah							50,000,000	29,949,000	29,949,000	Dana Transfer Umum-DAU	-		
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		90%		0	0	725,000,000		725,000,000		
	2.13.01.2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit		-	-	725,000,000		725,000,000		
			Rincian :												
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Toyota Hiace													

	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%		168,000,000	168,000,000	168,000,000		0	
	2.13.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kabupaten Mojokerto	168,000,000	168,000,000	168,000,000		-	
		Rincian :												
		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor dan Kebersihan Kantor							147,000,000	147,000,000	147,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
		Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi							21,000,000	21,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	90%		111,000,000	111,000,000	111,000,000		0	
	2.13.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	Kabupaten Mojokerto	95,000,000	95,000,000	95,000,000		-	
		Rincian :												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional							15,000,000	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							80,000,000	80,000,000	80,000,000	Dana Transfe r Umum-DAU	-	
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	20 Unit	11 Unit	Kabupat en Mojokert o	16,000,000	16,000,000	16,000,000		-	
		Rincian :												
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor							16,000,000	16,000,000	16,000,000	Dana Transfe r Umum-DAU	-	
II	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		L	Persentase Desa yang tertata dengan baik	23%	23%		175,000,000	169,650,000	169,650,000		-5,350,000	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan desa		L	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	70 Desa	70 Desa		175,000,000	169,650,000	169,650,000		(5,350,000)	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	5 Unit	Kabupat en Mojokert o	175,000,000	169,650,000	169,650,000		(5,350,000)	
		Rincian :												
		Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)							175,000,000	169,650,000	169,650,000	Dana Transfe r Umum-DAU	-	

III	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		L	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	72%	72%		86,000,000	78,142,700	78,142,700		-7,857,300	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		L	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa		86,000,000	78,142,700	78,142,700		-7,857,300	
	2.13.03.2.01.0 001	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		L	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupat en Mojokert o	43,000,000	38,392,700	38,392,700		(4,607,300)	
		Rincian :												
		Fasilitasi / Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas BUMDesma							28,000,000	23,392,700	23,392,700	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Fasilitasi dan Pembinaan UPK PPK Mandiri							15,000,000	15,000,000	15,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
	2.13.03.2.01.0 003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupat en Mojokert o	43,000,000	39,750,000	39,750,000		(3,250,000)	
		Rincian :												
		Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan							43,000,000	39,750,000	39,750,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	

IV	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		L	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	92%	92%		7,322,298,600	8,782,638,678	9,107,638,678		1,785,340,078	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		L	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	18 Kegiatan	18 Kegiatan		7,322,298,600	8,782,638,678	9,107,638,678		1,785,340,078	
				L	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	110 BUMDesa	110 BUMDesa							
	2.13.04.2.01.001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		L	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	25,000,000	22,750,000	22,750,000		(2,250,000)	
		Rincian :												
		Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa							25,000,000	22,750,000	22,750,000	-	-	
	2.13.04.2.01.003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	299 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	50,000,000	49,700,000	49,700,000		(300,000)	
		Rincian :												

		Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPDesa							50,000,000	49,700,000	49,700,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
	2.13.04.2.01.0 004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokume n	299 Dokumen	Kabupat en Mojokert o	111,000,000	100,118,000	100,118,000		(10,882,000)	
		Rincian :												
		Pendampingan Penyusunan APB Desa							12,000,000	12,000,000	12,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Fasilitasi/Pendampin gan Alokasi Dana Desa (ADD)							19,000,000	15,000,000	15,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Fasilitasi Pendampingan Dana Desa (DD)							30,000,000	23,118,000	23,118,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa							30,000,000	30,000,000	30,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi							20,000,000	20,000,000	20,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
	2.13.04.2.01.0 005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		L	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	322 Orang	Kabupat en Mojokert o	-	-	250,000,000		250,000,000	1. Untuk Bimtek Kades dan Sekdes terkait e Office Desa. Menindaklanj uti launching
		Rincian :												

		Bimtek Kades dan Sekdes terkait e Office Desa.							-		150,000,000	Dana Transfer Umum-DAU		Aplikasi e Office Desa dan Program Prioritas Desa Digital Service
		Pembinaan Kepala Dusun									100,000,000	Dana Transfer Umum-DAU		2. Untuk Pembinaan Kepala Dusun
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		L	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan	Kabupaten Mojokerto	20,000,000	18,653,500	18,653,500		(1,346,500)	
		Rincian :												
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							20,000,000	18,653,500	18,653,500	Dana Transfer Umum-DAU	-	
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		L	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	304 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	25,000,000	55,100,000	55,100,000		30.100.000	
		Rincian :												
		Up dating Profil desa dan Kelurahan							25,000,000	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
		BOP Program Desa Berdaya								30,100,000	30,100,000	BKK Prov		
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	36 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	35,000,000	28,237,500	28,237,500		(6,762,500)	
		Rincian :												

		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							35,000,000	28,237,500	28,237,500	Dana Transfe r Umum- DAU	-		
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	175 Desa	Kabupat en Mojokert o	25,000,000	23,175,000	98,175,000	Dana Transfe r Umum- DAU	73,175,000	Untuk Fasilitasi di 16 Kecamatan dan penyusunan Perbub batas desa
			Rincian :												
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa								25,000,000	23,175,000	98,175,000			
	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa			L	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokume n	24 Dokumen	Kabupat en Mojokert o	6,776,298,600	8,218,848,078	8,218,848,078		1,442,549,478	
			Rincian :												
		Fasilitasi Kepesertaan dan Pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (BPJS Kesehatan)				-				5,851,858,622	7,117,482,500	7,117,482,500	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Pembayaran iuran/premi BPJS Ketenagakerjaan bagi RT, RW, BPD dan Karang Taruna				7,117,482,500				924,439,978	1,101,365,578	1,101,365,578	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			L	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokume n	304 Dokumen	Kabupat en Mojokert o	200,000,000	189,356,600	189,356,600		(10,643,400)	
			Rincian :												

		Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan							50,000,000	39,356,600	39,356,600	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Fasilitasi Pemutakhiran Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun							50,000,000	50,000,000	50,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Pendampingan dan Pembinaan Lomba Desa							100,000,000	100,000,000	100,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
	2.13.04.2.01.008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokume n	50 Dokumen	Kabupat en Mojokert o	55,000,000	76,700,000	76,700,000		21,700,000	
		Rincian :												
		Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa							55,000,000	55,000,000	55,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		BOP Program. Pemberdayaan BUMdesa								26,700,000	26,700,000	BKK Prov		
V	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		L	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	89%	89%		823,000,000	1,490,425,000	1,745,425,000		922,425,000	
				L	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	78%	78%							

	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		L	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	19 Kegiatan	19 Kegiatan		823,000,000	1,490,425,000	1,745,425,000		922,425,000	
					Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif	6 Kegiatan	6 Kegiatan							
	2.13.05.2.01.002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		L	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	5 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	75,000,000	320,200,000	420,200,000		345,200,000	
		Rincian :												

		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Posyandu							30,000,000	30,200,000	30,200,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LPM							45,000,000	40,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
		Pendampingan Transformasi Kelembagaan Posyandu							-	150,000,000	150,000,000		-	
		Pelatihan KPM dalam penurunan Stunting							-	100,000,000	100,000,000			
		Peningkatan kapasitas tim pembina posyandu, pengurus dan kader posyandu							-	-	100,000,000			
	2.13.05.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		L	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	704 Lembaga	Kabupaten Mojokerto	75,000,000	312,400,000	317,400,000		242,400,000	
		Rincian :												
		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat							25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-	

		Peningkatan Kapasitas TP-PKK Desa, Kecamatan dan Kabupaten Mojokerto							25,000,000	262,400,000	267,400,000			
		Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)							25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-	
	2.13.05.2.01.005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	68,000,000	89,000,000	89,000,000		21,000,000	
		Rincian :												
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							68,000,000	89,000,000	89,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
		BOP Program Jatim Puspa										BKK Prov.		
	2.13.05.2.01.006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		L	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	Kabupaten Mojokerto	30,000,000	28,600,000	28,600,000		(1,400,000)	
		Rincian :												
		Penyelenggaraan Workshop Teknologi Tepat Guna							20,000,000	18,600,000	18,600,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	

		Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya desa (pamsimas)							10,000,000	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
	2.13.05.2.01.007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		L	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	18 Laporan	Kabupaten Mojokerto	75,000,000	63,525,000	63,525,000		(11,475,000)	
		Rincian :												
		Pembinaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten dan Provinsi							50,000,000	38,525,000	38,525,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
		Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							20,000,000	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
		Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tingkat Provinsi							5,000,000	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	
	2.13.05.2.01.008	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	500,000,000	676,700,000	826,700,000		326,700,000	
		Rincian :												
		Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan (Pleno PKK)							20,000,000	86,700,000	86,700,000	Dana Transfer Umum-DAU	-	

		Perlombaan PKK Bidang umum						20,000,000	90,000,000	90,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto						20,000,000	20,000,000	20,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK						20,000,000	20,000,000	20,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong						20,000,000	60,000,000	60,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan bagi kader PKK Desa (Pokir Dewan)						400,000,000	400,000,000	400,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU	-	
		Pelatihan bagi PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)						-	-	150,000,000	Dana Transfe r Umum- DAU		
JUMLAH								13,805,831,600	15,889,922,578	17,359,922,578		3,554,090,978	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman, landasan dan

referensi dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Sekretariat, Bidang-bidang serta seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - Menjaga konsistensi antara P-RKPD, P-Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
- b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari PAPBD Kabupaten, PAPBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari PAPBN, harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, PRKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi antar Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan bisa berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Mojokerto, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO



YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 196806131996031002